

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2024

Zefanya Risca Cristiani^{1*}, Aura Aulia Sofia², Eva Hany Fanida³, Ravienda Anita Fitri⁴

¹⁻⁴Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25040674112@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674126@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³,

reviendafitrie@unesa.ac.id⁴

*Penulis Korepondensi: 25040674112@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Optimal budget management is crucial to ensure regional development is on target amidst limited fiscal resources. This study aims to analyze the effectiveness and efficiency levels of regional expenditure realization in the Jember Regency Budget (APBD) for the 2021–2024 period. The method used is descriptive quantitative with document analysis of the Budget Realization Report (LRA) and literature study. Effectiveness is measured by comparing expenditure realization against its target, while efficiency is measured by comparing expenditure realization against revenue realization. The results show that the effectiveness level from 2021 to 2023 is in the effective category (91.68%–94.16%), but decreased to the moderately effective category (87.56%) in 2024. In terms of efficiency, expenditure realization in 2021 and 2022 fell into the inefficient category (104.66% and 112.06%), improved to less efficient in 2023 (96.08%), and showed optimal conditions in 2024. The implication of this research is the need to strengthen synchronization between expenditure planning and regional revenue capacity. Increasing efficiency is urgent to ensure financial management remains balanced and capable of supporting future regional fiscal sustainability.

Keywords: APBD; Effectiveness; Efficiency; Jember Regency; Regional Expenditure.

Abstrak. Pengelolaan anggaran yang optimal sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran di tengah keterbatasan sumber daya fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi belanja daerah pada APBD Kabupaten Jember periode 2021–2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis dokumen terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan studi literatur. Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap targetnya, sedangkan efisiensi diukur melalui perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas tahun 2021–2023 berada dalam kategori efektif (91,68%–94,16%), namun menurun menjadi cukup efektif (87,56%) pada tahun 2024. Dari aspek efisiensi, realisasi belanja tahun 2021 dan 2022 masuk kategori tidak efisien (104,66% dan 112,06%), lalu membaik menjadi kurang efisien pada 2023 (96,08%), dan menunjukkan kondisi optimal pada 2024. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan sinkronisasi antara perencanaan belanja dengan kapasitas pendapatan daerah. Peningkatan efisiensi sangat mendesak agar pengelolaan keuangan tetap seimbang dan mampu mendukung keberlanjutan fiskal daerah di masa mendatang.

Kata kunci: APBD; Belanja Daerah; Efektivitas; Efisiensi; Kabupaten Jember.

1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah juga memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong munculnya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan

pembangunan selama satu tahun anggaran. Melalui APBD tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kondisi tertentu, misalnya ketika perekonomian mengalami perlambatan, belanja pemerintah dapat berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi di daerah (Harsono, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara baik agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun dalam praktiknya, pengelolaan anggaran daerah tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih terdapat berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi serta potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat memicu praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Silaban, 2024).

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dapat dilihat dari tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target anggaran yang telah direncanakan. Sementara itu, efisiensi menunjukkan bagaimana anggaran tersebut digunakan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis efektivitas dan efisiensi dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Dwifarchan & Sulistiyanti, 2023; Hotimah & Fattah, 2025; Trianto, 2013). Namun demikian, setiap daerah memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, analisis mengenai pengelolaan anggaran juga perlu dilakukan secara lebih spesifik pada masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki dinamika pembangunan yang cukup kompleks, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas dan efisiensi realisasi belanja daerah Kabupaten Jember menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara optimal dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember selama periode 2021–2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah mencakup segala bentuk penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah (Republik Indonesia, 2005). Dalam pengelolaannya, keuangan daerah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip pertama adalah kejujuran, yang menuntut setiap pengelola keuangan daerah memiliki integritas tinggi dalam menyusun dan melaporkan keuangan tanpa manipulasi. Prinsip kedua adalah transparansi, yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan DPRD agar proses pengelolaan keuangan dapat diawasi secara optimal. Selain itu, terdapat prinsip akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara jelas dan terukur.

Prinsip berikutnya adalah *value for money*, yang menekankan bahwa penggunaan anggaran harus ekonomis, efisien, dan efektif (Republik Indonesia, 2005). Terakhir, prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam memberikan masukan serta mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Republik Indonesia, 2005). APBD berfungsi sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah selama satu periode anggaran. Secara konseptual, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan publik yang memiliki berbagai fungsi penting. Fungsi tersebut meliputi fungsi otorisasi sebagai dasar pelaksanaan anggaran, fungsi perencanaan sebagai pedoman kegiatan pemerintah, serta fungsi pengawasan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. Selain itu, APBD juga memiliki fungsi alokasi dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi ekonomi, fungsi distribusi untuk menciptakan keadilan, serta fungsi stabilisasi dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah (Republik Indonesia, 2005). Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Republik Indonesia, 2005). Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Belanja daerah mencakup seluruh

pengeluaran untuk membiayai program pemerintah, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Sementara itu, pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran yang tersedia. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan publik. Belanja daerah menjadi komponen penting dalam APBD karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2005). Secara umum, belanja daerah terbagi ke dalam beberapa jenis. Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, seperti gaji pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Selain itu, terdapat belanja tak terduga yang digunakan untuk kondisi darurat, seperti bencana alam atau krisis. Belanja daerah juga mencakup belanja transfer yang diberikan kepada pemerintah desa atau lembaga lain, serta belanja hibah dan bantuan sosial yang ditujukan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dengan pengelolaan belanja yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dalam konteks belanja daerah, efektivitas diukur berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin besar tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target belanja.

Jika nilai efektivitas mendekati atau mencapai 100%, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan secara optimal. Efektivitas juga tidak hanya dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal. Pengelolaan yang efisien berarti bahwa penggunaan anggaran tidak melebihi kapasitas pendapatan daerah dan mampu meminimalkan pemborosan. Rasio efisiensi yang berada di bawah atau mendekati 100% menunjukkan bahwa pengeluaran daerah masih dalam batas kemampuan pendapatan. Sebaliknya, jika rasio melebihi 100%, maka menunjukkan bahwa belanja lebih besar dari pendapatan sehingga pengelolaan keuangan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi belanja daerah Kabupaten Jember. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur serta menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah berdasarkan data keuangan yang terdapat dalam dokumen resmi pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi yang bersumber dari laporan keuangan daerah.

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka dengan tujuan untuk menguji atau menjelaskan suatu fenomena secara objektif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data keuangan daerah yang terdapat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka dengan tujuan untuk menguji atau menjelaskan suatu fenomena secara objektif (Sugiyono, 2016)

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan data sekunder yang tersedia dalam berbagai dokumen resmi pemerintah daerah. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember, laporan APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah. Data tersebut dapat diperoleh melalui publikasi resmi pemerintah daerah maupun sumber informasi yang tersedia secara daring.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti laporan keuangan daerah dan dokumen anggaran (Sugiyono, 2016), seperti laporan keuangan daerah, dokumen anggaran, serta laporan realisasi belanja daerah. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian yang memanfaatkan data sekunder untuk memahami suatu fenomena berdasarkan sumber data yang telah tersedia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan cara menghitung dan menganalisis rasio efektivitas serta rasio efisiensi realisasi belanja daerah Kabupaten Jember dalam beberapa tahun anggaran. Hasil perhitungan tersebut

kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah serta untuk melihat perkembangan kinerja keuangan daerah dari tahun ke tahun.

$$EFEKTIFITAS = \frac{REALISASI\ ANGGARAN\ BELANJA}{TARGET\ ANGGARAN\ BELANJA} \times 100\%$$

Berdasarkan pada standar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Harry et al., 2019), efektivitas dinilai dalam lima tingkatan:

- a. Jika hasil dari perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan kurang dari 60%, maka kriterianya sangat efisien.
- b. Jika hasil dari perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan berada di antara 60% – 80%, maka kriterianya efisien.
- c. Jika hasil dari perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan berada di antara 80% – 90%, maka kriterianya cukup efisien.
- d. Jika hasil dari perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan berada di antara 90% – 100%, maka kriterianya kurang efisien.
- e. Jika hasil dari perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan berada di atas 100%, maka kriterianya tidak efisien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tabel 1. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja.

TAHUN	TARGET BELANJA	REALISASI BELANJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	KETERANGAN
2021	Rp 4.070.352.965.000,00	Rp 3.731.626.715.976,43	91,68%	Efektif
2022	Rp 4.421.761.557.082,00	Rp 4.163.361.602.016,37	94,16%	Efektif
2023	Rp 4.118.279.658.762,00	Rp 3.802.222.061.677,92	92,33%	Efektif
2024	Rp 4.372.730.733.767,00	Rp 3.828.713.541.197,57	87,56%	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1., tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja Kabupaten Jember selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif baik meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Efektivitas anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sartika et al., 2024).

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas anggaran belanja mencapai 91,68% dengan realisasi belanja sebesar Rp3,73 triliun dari target Rp4,07 triliun. Persentase ini menunjukkan bahwa

realisasi anggaran telah mencapai sebagian besar dari target yang direncanakan sehingga dapat dikategorikan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas meningkat menjadi 94,16%, dengan realisasi belanja sebesar Rp4,16 triliun dari target Rp4,42 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Dengan tingkat efektivitas yang semakin mendekati 100%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun tersebut berjalan cukup optimal.

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas mengalami sedikit penurunan menjadi 92,33%. Meskipun demikian, nilai tersebut masih termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang telah direncanakan tetap dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Sementara itu, pada tahun 2024 tingkat efektivitas anggaran belanja tercatat sebesar 87,56%, yang masuk dalam kategori cukup efektif. Penurunan ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian anggaran yang belum dapat direalisasikan secara optimal dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian kebijakan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, atau perubahan prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja Kabupaten Jember selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik karena sebagian besar realisasi belanja mampu mendekati target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah relatif mampu menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan tingkat penyerapan anggaran agar lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil Tabel 2. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja.

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI BELANJA	TINGKAT EFEKTIVITAS	KETERANGAN
2021	Rp 3.565.326.116.830,38	Rp 3.731.626.715.976,43	104,66%	Tidak Efisien
2022	Rp 3.715.160.123.903,32	Rp 4.163.361.602.016,37	112,06%	Tidak Efisien
2023	Rp 3.957.426.651.267,85	Rp 3.802.222.061.677,92	96,08%	Kurang Efisien
2024	Rp 4.129.093.918.995,45	Rp 3.828.713.541.197,57	92,72%	Kurang Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1, tingkat efisiensi realisasi belanja daerah Kabupaten Jember selama periode 2021 2024 menunjukkan kondisi yang bervariasi. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil nilai rasio tersebut, maka pengelolaan anggaran dapat dikatakan semakin efisien karena belanja tidak melebihi kemampuan pendapatan yang dimiliki daerah (Sartika et al., 2024).

Pada tahun 2021, tingkat efisiensi anggaran belanja mencapai 104,66% yang termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah, sehingga pemerintah daerah kemungkinan harus memanfaatkan sumber pembiayaan lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) atau pembiayaan lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pada tahun 2022, tingkat efisiensi kembali menunjukkan kondisi tidak efisien dengan rasio sebesar 112,06%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti bahwa selisih antara realisasi belanja dan pendapatan semakin besar. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa belanja daerah meningkat secara signifikan untuk membiayai berbagai program pembangunan, namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah yang sebanding.

Pada tahun 2023, tingkat efisiensi mengalami perbaikan dengan rasio sebesar 96,08% yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Meskipun masih belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal, penurunan rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengendalikan belanja agar lebih mendekati kemampuan pendapatan daerah yang tersedia.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,129 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp3,828 triliun. Dengan demikian, rasio efisiensi pada tahun tersebut berada di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran relatif lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih sehat.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa pada awal periode penelitian, pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Jember masih mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya perbaikan dalam pengendalian belanja sehingga rasio efisiensi

menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Jember selama periode 2021–2024 secara umum sudah berjalan cukup baik dari sisi efektivitas. Hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran yang mampu mendekati target pada sebagian besar tahun pengamatan, sehingga menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD dapat terlaksana dengan cukup maksimal. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan tingkat efektivitas, kondisi tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan tetap mencerminkan kinerja yang cukup baik.

Di sisi lain, aspek efisiensi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pada awal periode penelitian, khususnya tahun 2021 dan 2022, realisasi belanja yang melebihi pendapatan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum seimbang. Walaupun pada tahun-tahun berikutnya mulai terlihat adanya perbaikan, kondisi efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian terhadap pengeluaran masih perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran lebih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperkuat perencanaan dan pengendalian anggaran agar tidak hanya mampu mencapai target, tetapi juga dapat mengelola keuangan secara lebih hemat dan tepat guna. Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga perlu menjadi perhatian agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja dapat terjaga. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran juga penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar analisis diperluas dengan menambahkan variabel lain atau membandingkan dengan daerah lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Cakrawala Today. (2025, March 14). *Memahami struktur APBD: Membela kepentingan masyarakat*. <https://cakrawalatoday.com/2025/03/14/memahami-struktur-apbd-membela-kepentingan-masyarakat/>
- Dwifarchan, R. M. R., & Sulistiyanti, U. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1), 64–78. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2586>
- Halim, A. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*.
- Harry, P., Grace, N., & Rudy, P. (2019). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 2979–2988.
- Harsono, H. A. S. (2021). Analisis pengaruh belanja modal dan belanja operasional terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2004–2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2).
- Hotimah, K., & Fattah, V. (2025). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja operasi dan belanja modal daerah Kota Palu. *Journal of Economics and Management Sciences*, 7, 785–794. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207>
- Kompas.com. (2024, October 1). 6 jenis belanja daerah: Belanja pegawai, bansos hingga hibah. <https://money.kompas.com/read/2024/10/01/112148426/6-jenis-belanja-dacrah-belanja-pegawai-bansos-hingga-hibah?page=all>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- OCBC Indonesia. (2023, May 4). Keuangan daerah: Pengertian, dasar hukum, prinsip & sumber. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/04/keuangan-dacrah-adalah>
- Pemerintah Kabupaten Jember. (2023). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023*. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember.
- Pemerintah Kabupaten Jember. (2023). *Laporan realisasi anggaran PPKD*. Portal Resmi Kabupaten Jember.
- Pemerintah Kabupaten Jember. (2024). *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sartika, D., Ridwan, R., Gainau, P. C., Setyowati, W., Arshandy, E., Sari, R. P., Hantono, Hermelinda, T., Sopanah, A., Aprianti, S., Dwitayanti, Y., Andhayani, A., Rusdianti, I. S., Afriansyah, B., Sinaga, I., & Anshori, S. (2024). *Akuntansi sektor publik* (Vol. 2).
- Silaban, D. G. (2024). Analisis pengaruh dampak kurangnya transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 1(5), 29–38. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i5.504>

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko. (2017). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. BPFE.

Trianto, A. (2013). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang (pp. 65–77).